

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
PENGATURAN PENGANGKUTAN BATUBARA DALAM PROVINSI
JAMBI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

AL FAJRI
1910012111022

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

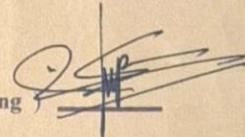
PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 08/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Al Fajri
NPM : 1910012111022
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Implementasi Pembinaan Dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi

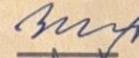
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Rabu tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

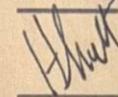
1. Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H (AnggotaPenguji)



3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 08/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Al Fajri
NPM : 1910012111022
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Implementasi Pembinaan Dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN
PENGANGKUTAN BATUBARA DALAM PROVINSI JAMBI**

Al Fajri¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati . R, S.H, M.H.².
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: alfajrialfarizi28@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Pasal 10 Angka 2 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi adalah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan dan penindakan dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama instansi terkait. Rumusan masalah adalah: 1). Bagaimanakah Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi? 2).Apa saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi? 3.)Apa saja Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, menggunakan sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, data yang terkumpul dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1.)Implementasi Pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan berupa: a). Sosialisasi b). Pengendalian c). pengawasan, d). penindakan. 2.) Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan seperti; a.)kurangnya sumber daya manusia b.)sarana dan prasarana c.)terbatasnya anggaran d.)disposisi belum terlaksana. 3.) Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan seperti: a). Meningkatkan kerja sama dengan elemen lainnya b).merekrut pegawai honorer c). mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Implementasi, Pengaturan Pengangkutan batubara, Pembinaan dan Pengawasan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pembinaan Dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. tetapi penulis menyadari bahwa banyak didalamnya terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H** selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan saran-saran hingga penulisan skripsi tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu Prof. Dr. Diana Kartika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara di Universitas Bung Hatta Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H
4. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H
5. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Bapak Drs. Atma Jaya, M.Si
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis berkuliah dan seluruh staf TU dan staf lain yang selalu sabar dalam mengingatkan dan melayani segala urusan administrasi selama ini.
7. Teruntuk Ayahanda A.Zam-Zami dan Ibunda Asmayarni yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, do'a dan cinta serta telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terimakasih atas apa yang telah dikorbankan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.
8. Terima kasih kepada saudara dan saudari penulis tersayang kakak Rendy azmindra dan Adik Nurul Fadhillah yang telah memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik teman, sahabat sanak saudara, dan sebagainya semoga segala kebaikan dan pertolongan mendapat berkah Allah Swt.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Padang, Agustus 2024

Penulis,

AL FAJRI

NPM 1910012111022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Analisa Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi	12
1. Pengertian Implementasi.....	12
2. Pengertian Implementasi Menurut Ahli.....	13
3. Tujuan Implementasi	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Dan Pengawasan	16
1. Pengertian Pembinaan.....	16
2. Tujuan Pembinaan	18
3. Pengertian Pengawasan.....	19

4. Tujuan Pengawasan	22
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.....	24
D. Tinjauan Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara	25
1. Pengertian Batubara	25
2. Pengertian Pengangkutan.....	27
3. Jenis-Jenis Pengangkutan.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara	32
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.....	41
C. Upaya-Upaya Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.....	45
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan beragam. Salah satunya adalah sumber daya alam batubara. Batubara juga merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.

Sumber daya mineral dan batubara yang dimiliki bangsa Indonesia. Apabila dikelola dengan baik akan memberikan dampak kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap di angkat kapan saja. Batubara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang berasal dari batuan sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur- unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen Batubara merupakan salah satu sumber energi di Indonesia.¹

Hingga tahun 2021 produksi tambang batubara Indonesia sebagian besar ditujukan untuk pasar ekspor khususnya ke Cina. Di satu sisi ekspor batubara akan menghasilkan devisa, namun di sisi lain kebutuhan batubara untuk kepentingan domestik juga harus terpenuhi. Di sini terjadi tarik menarik antara kepentingan ekspor dan pemenuhan kebutuhan domestik.²

¹ Arif Irwandy, 2014, Batubara Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

² Harta Haryadi, 2021, *Management of Indonesian Coal Resources and Its Prospects in the Global Market Using SWOT Analysis*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 17, Bandung.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengemukakan cadangan batubara Indonesia saat ini mencapai 38,84 miliar ton. Dengan rata-rata produksi batubara sebesar 600 juta ton per tahun, maka umur cadangan batubara masih 65 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru. Selain cadangan batubara, masih ada juga sumber daya batubara yang tercatat sebesar 143,7 miliar ton. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong upaya pemanfaatan untuk memberikan kesejahteraan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia.³

Kebutuhan terhadap energi batubara akan selalu bertambah seiring dengan meningkatnya pertumbuhan populasi dan standar hidup dari manusia. Laju pertumbuhan konsumsi terhadap energi ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan adanya perkembangan ekonomi masyarakat. Energi ini dibutuhkan untuk menggerakkan mesin produksi dan infrastruktur industri guna mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Minyak bumi dan batubara masih menjadi sumber energi penopang bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kontribusi energi batubara salah satu yang terbesar setelah minyak bumi dibandingkan dengan energi primer lainnya.

Pertambangan batubara sebagai sumber daya alam yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi bagi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan sebuah pengelolaan yang baik agar benar-benar dapat

³ <https://www.esdm.go.id> di akses pada hari minggu tanggal 2 Maret tahun 2023 pukul 14 : 30 WIB.

memberikan manfaat secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Keberadaan sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah bukan hanya dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah saja namun juga di sertai pembinaan dan pengawasan yang baik dan berkelanjutan, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup, agar terwujudnya keseimbangan lingkungan masyarakat.

Sektor pertambangan merupakan salah satu komoditas yang diunggulkan bagi provinsi jambi karena menjadi salah satu pemasukan bagi pendapatan daerah provinsi jambi. Sektor ini juga merupakan sektor yang strategis, dan bisa menjadi tulang punggung bagi pendapatan daerah tersebut.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat dalam menunjang perekonomian dan pergerakan barang dan jasa serta syarat mutlak bagi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Jalan memiliki peran dan fungsi utama dalam arus perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, juga memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar daerah serta mempercepat pengembangan wilayah dari keterisolasian dengan daerah lain. Transportasi dibutuhkan untuk mengangkut hasil tambang, baik saat mengangkut dari lokasi tambang menuju pabrik, maupun mengangkut hasil tambang dari lokasi tambang menuju pelabuhan, untuk kemudian hasil tambang tersebut diekspor ke luar negeri. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana transportasi jalan yang baik merupakan syarat mutlak yang harus

dipenuhi seluruh wilayah di tanah air.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, terdapat pengertian jalan: jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam penjelasan umum tentang jalan menegaskan hal-hal penting mengenai peranan dan fungsi jalan yakni sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan jalan umum tertentu atau jalur sungai sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sesuai dengan

⁴ Tommy Putra Armada, 2014, Analisa Ekonomi Perbaikan Jalan Palembang – Betung Kab.Banyuasin Terhadap Nilai Kerugian Akibat Kemacetan, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol. 2No. 3, hlm. 1

kewenangannya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi, menjelaskan :

1. Khusus untuk pengangkutan batubara dari lokasi tambang di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo dapat melalui jalan umum tertentu sebagai berikut :
 - a. Dari Kabupaten Bungo melalui jalan Muara Bungo – Muara Tebo menuju ke ruas jalan Simpang Niam – Lubuk Kambing – Merlung – Pelabuhan di Taman Rajo Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Dari Kabupaten Tebo menuju ke ruas jalan Simpang Niam – Lubuk Kambing – Merlung – Pelabuhan di Taman Rajo Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - c. Khusus pengangkutan batu bara dari lokasi tambang ke wilayah Sumatera Barat dapat melewati jalan umum dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkutan batubara dari lokasi tambang menuju ruas jalan Muara Bungo – Muara Tebo ditetapkan oleh Bupati yang bersangkutan sesuai kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat(1), Ayat(2) dan Ayat(3) tentang Pembinaan dan Pengawasan yang mana dijelaskan sebagai berikut

:

1. Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan jalan umum tertentu atau jalur sungai sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan penindakan dilakukan Dinas Perhubungan bersama instansi terkait.
3. Bupati/Walikota menyampaikan laporan setiap triwulan atau sewaktu waktu diperlukan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa Provinsi Jambi memiliki cadangan batu bara sebanyak 1,9 miliar ton.⁵ Adapun cadangan komoditas tersebut tersebar di berbagai daerah di provinsi yang berada di Pulau Sumatra tersebut. Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Harry Endria di Jambi, menyatakan bahwa. Kalau produksi batu bara di Jambi sebesar 19 juta ton per tahun, maka dengan jumlah cadangan sebanyak 1,9 miliar ton maka diperkirakan batu bara di Jambi baru akan bisa habis pada 100 tahun mendatang.⁶

Di balik kontribusi finansial untuk Daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari

⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221023/44/1590582/esdm-mencatat-jambi-punya-cadangan-harta-karun-jumbo> Diakses pada hari senin tanggal 24 oktober 2023 pukul 20.00 WIB

⁶ *Ibid.*

sisi pengangkutannya dari mulut tambang ke *stockpile* (tempat penumpukan). Truk pengangkut batubara yang berjumlah ratusan bergerak dari wilayah tambang di beberapa Kabupaten yang kebanyakan berada di area Barat Jambi menuju pelabuhan di area Timur Jambi. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum ini telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui.

Kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan daya dukung 8 ton tidak mampu menahan beban belasan hingga puluhan ton kendaraan pengangkut batubara dan juga di perparah dengan kemacetan yang setiap hari terjadi di ruas jalan umum tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN PENGANGKUTAN BATU BARA DALAM PROVINSI JAMBI**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi?
2. Apa saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi?
3. Apa saja Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Dalam

Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Pembinaan Dan pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi jambi.
3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁷ Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya⁸.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan hukum primer didalam penelitian ini::

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan.

c. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012

⁸ *Ibid*, hlm 106.

Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, dan lainnya:
 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
 - b. Dokumen
 - c. Jurnal dan artikel
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan untuk keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku bacaan dan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Studi ini dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Jambi.⁹

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk

⁹ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206.

tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya, dan dilaksanakan dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Bapak Drs. Atma Jaya, M.Si

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah Analisa kualitatif.¹⁰ Analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti terhadap data primer dan sekunder.¹¹

¹⁰ Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Salemba Humanika, hlm 34.

¹¹ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 53.